



ISU ZONA IDENTIFIKASI PERTAHANAN UDARA DI LAUT TIONGKOK SELATAN

Rizki Roza*)

Abstrak

Tiongkok telah menegaskan akan memberlakukan Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Laut Tiongkok Selatan jika muncul ancaman terhadap keamanan maritim dan udaranya. Keberadaan pulau-pulau buatan di Kepulauan Spratly akan meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk memberlakukan zona pertahanan udara. Pendekatan militer untuk menekan Tiongkok terbukti sangat beresiko, sehingga perlu dipertimbangkan suatu pendekatan alternatif nonmiliter.

Pendahuluan

Persoalan tumpang tindih klaim yurisdiksi di antara beberapa negara terhadap sebagian wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) hingga saat ini masih menjadi isu sentral yang sering mempengaruhi stabilitas dan keamanan kawasan. Sejumlah perkembangan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini cenderung meningkatkan kekhawatiran masyarakat internasional akan potensi konflik di LTS. Salah satu perkembangan terkini yang menarik perhatian dan perlu diantisipasi adalah adanya pemikiran Tiongkok untuk memberlakukan zona identifikasi pertahanan udara (*Air Defense Identification Zone/ADIZ*) di LTS.

Kekhawatiran diberlakukannya ADIZ di LTS meningkat setelah salah seorang pejabat senior militer Tiongkok menyatakan bahwa ADIZ dapat saja diterapkan di LTS jika dibutuhkan. Penerapan ADIZ di LTS dapat

menjadi ancaman bagi kebebasan navigasi dan stabilitas kawasan, termasuk kepentingan nasional Indonesia. Bagaimana semestinya pernyataan tersebut dipahami? Apa yang perlu dilakukan untuk merespon perkembangan yang terjadi? Tulisan singkat ini berusaha memberikan gambaran utuh agar pernyataan tersebut bisa dipahami dengan tepat, sehingga perkembangan terkait persoalan LTS dapat direspon dengan baik.

Pemberlakuan ADIZ di Laut Tiongkok Selatan

Diadakan sejak tahun 2002, *The Shangri-La Dialogue* (SLD) lahir untuk menjadi forum dimana menteri-menteri pertahanan dari kawasan Asia Pasifik bertemu dan mengembangkan kerja sama keamanan. Dalam perkembangannya, SLD telah menjadi salah satu pertemuan di bidang pertahanan dan keamanan yang sangat penting bagi

*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: rizki.roza@dpr.go.id



arsitektur keamanan kawasan Asia Pasifik. SLD telah membantu negara-negara di kawasan dalam membangun sikap saling percaya, termasuk di antara kekuatan-kekuatan besar yang memiliki kepentingan di kawasan seperti Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Sejak pertama kali mengirimkan delegasi ke SLD pada 2007, Tiongkok memanfaatkan forum ini untuk menjawab kritik masyarakat internasional dan menyampaikan kepentingan-kepentingannya termasuk yang berkaitan dengan isu LTS.

Peluang diberlakukannya ADIZ di LTS disampaikan oleh delegasi Tiongkok dihadapan pertemuan SLD yang dilaksanakan di Singapura pada akhir Mei lalu. Wakil Kepala Staf Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok, Laksamana Sun Jianguo menyatakan Tiongkok dapat saja memberlakukan ADIZ di LTS. Namun demikian, keputusan ini akan bergantung pada ancaman terhadap keamanan maritim dan udaranya. Jika ancaman cukup tinggi, Tiongkok akan menggunakan reklamasi di Kepulauan Spratly untuk membangun fasilitas militernya.

Sejumlah pihak yang juga menghadiri pertemuan SLD mencoba meminta penjelasan lebih jauh terkait pernyataan tersebut. Disayangkan Laksamana Sun selaku ketua delegasi Tiongkok cenderung menghindari pembahasan lebih lanjut dan lebih berhati-hati dalam menanggapi perdebatan terkait sengketa LTS. Akibatnya banyak pihak menganggap delegasi Tiongkok dalam pertemuan SLD telah gagal menghilangkan potensi kesalahpahaman atas tindakan-tindakan mereka di LTS, termasuk pernyataannya terkait ADIZ.

Kekhawatiran diberlakukannya ADIZ di LTS oleh Tiongkok sesungguhnya telah berkembang sejak lama. Setelah Beijing mengumumkan pemberlakuan ADIZ di Laut Tiongkok Timur (LTT), banyak pihak mulai menganalisa kapan Tiongkok akan melakukan hal yang sama di LTS. Kekhawatiran ini kembali mencuat setelah Laksamana Sun menyampaikan posisi Tiongkok tentang pemberlakuan ADIZ di LTS di hadapan forum SLD.

Jauh sebelum pidato Laksamana Sun, beberapa pernyataan dari pihak Tiongkok sendiri telah menguatkan dugaan masyarakat internasional akan berlakunya ADIZ di LTS. Salah satunya adalah pernyataan seorang pejabat militer Tiongkok pada Februari 2014

yang menyebutkan bahwa pemberlakuan ADIZ di LTS diperlukan bagi kepentingan nasional jangka panjang. Saat mengumumkan ADIZ di LTT pada tahun 2013, pejabat militer Tiongkok juga mengakui bahwa mereka berencana untuk memberlakukan ADIZ di kawasan lainnya di masa depan.

Kemampuan Tiongkok berlakukan ADIZ

Kemampuan Tiongkok untuk menerapkan ADIZ di LTS sangat dipengaruhi oleh proyek-proyek reklamasi mereka di Kepulauan Spratly, misalnya reklamasi di *Fiery Cross Reef*. *Fiery Cross Reef* merupakan bagian dari wilayah yang diperebutkan beberapa negara yaitu Tiongkok, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Setelah mendudukinya sejak 1987, Tiongkok memulai konstruksi pada awal 1988. Pada 1990 hanya terdapat struktur kecil hasil pembangunan yang dilakukan Tiongkok, yang kemudian pada 2014 telah berkembang menjadi fasilitas yang mampu menampung 200 personel yang dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, termasuk helipad dan dermaga. Pembangunan lebih besar terhadap *Fiery Cross* yang dimulai pada Agustus 2014 berhasil mengubah dataran *Fiery Cross* menjadi sebelas kali lebih besar dari sebelumnya, menjadi 'pulau' terbesar di Spratly. *Fiery Cross* bukan satu-satunya proyek reklamasi, melainkan hanya salah satu dari tujuh proyek reklamasi yang dijalankan Tiongkok.

Persoalannya bukan pada terbentuknya pulau buatan di wilayah sengketa, melainkan fasilitas yang dibangun di atas pulau buatan tersebut. Pada Januari lalu, media Filipina sudah memberitakan bahwa Tiongkok kemungkinan akan mampu menyelesaikan pembangunan landasan udara kedua di LTS pada akhir 2015. Citra satelit yang dipublikasikan pada November 2014 menunjukkan *Fiery Cross* akan mampu digunakan sebagai landasan udara sepanjang tiga kilometer. Landasan udara ini mencukupi untuk menampung pesawat militer Tiongkok yang terbesar sekalipun. Ini akan mejadi landasan udara kedua yang dimiliki Tiongkok di LTS, selain di *Woody Island*, Kepulauan Paracel. Citra satelit juga menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya membangun landasan udara tetapi beserta sistem keamanan dan persenjataannya.

Dengan memiliki landasan udara di

Fiery Cross Reef, kemampuan proyeksi kekuatan Tiongkok akan meningkat signifikan. Pesawat-pesawat militer Tiongkok dapat menjangkau bagian paling selatan LTS dengan cepat dan lebih sering tanpa lagi terkendala persoalan jarak dan kesulitan pengisian bahan bakar di udara. Tiongkok akan mampu melakukan patroli udara lebih sering di wilayah klaimnya, termasuk meningkatnya jangkauan kapal-kapal patroli mereka di kawasan tersebut. Memiliki landasan udara di Spratly, beserta berbagai fasilitas pendukungnya akan sangat memungkinkan Tiongkok untuk memberlakukan ADIZ di LTS, sebagaimana yang mereka lakukan di LTT pada November 2013.

Tiongkok saat ini tidak hanya sudah memiliki kemampuan yang akan memungkinkan mereka untuk menerapkan ADIZ di LTS, tetapi juga pada kenyataan beberapa tindakan mereka mengesankan Spratly telah menjadi wilayah pertahanan udaranya. Pada Mei lalu, tujuh pesawat patroli Filipina yang terbang secara terpisah melintasi Kepulauan Spratly mendapat peringatan melalui radio dari Tiongkok untuk menjauhi kawasan tersebut. Kejadian ini menjadi perhatian serius bagi Filipina karena seolah Tiongkok telah memberlakukan ADIZ tanpa pemberitahuan secara formal. Selanjutnya, dalam rekaman yang disampaikan delegasi AS pada forum SLD, diketahui bahwa saat pihak militer Tiongkok menghalau pesawat mata-mata AS di sekitar Spratly, peringatan yang disampaikan adalah pesawat AS harus keluar dari *military alert zone* Tiongkok.

Kondisi demikian yang menyebabkan spekulasi dan kekhawatiran bahwa Tiongkok akan membangun Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) di wilayah sengketa LTS menjadi cukup beralasan. Perkembangan ini perlu mendapat respon serius dari negara-negara di kawasan, karena jika Tiongkok benar-benar memberlakukan ADIZ di LTS maka akan menimbulkan dampak besar bagi upaya penyelesaian sengketa LTS dan stabilitas kawasan.

Respon terhadap kemungkinan ADIZ di LTS

Pemberlakuan ADIZ akan memperluas jangkauan pengawasan wilayah udara suatu negara, memberi negara tersebut lebih banyak waktu untuk merespon pesawat asing yang mungkin saja mengancam wilayahnya.

Pemberlakuan ADIZ oleh Tiongkok di LTS akan menyebabkan semua pesawat atau kapal yang melintasi zona dimaksud untuk menginformasikan keberadaan mereka kepada pihak berwenang Tiongkok. Bagi AS, pemberlakuan ADIZ di LTS bukan hanya ancaman bagi kebebasan navigasi di kawasan itu tetapi juga merupakan ancaman bagi wilayah Asia Pasifik secara lebih luas. Sementara itu, bagi negara-negara yang terlibat sengketa LTS, hal ini akan memperbesar kemampuan Tiongkok dalam menjaga dan mempertahankan wilayah yang diklaimnya.

Merespon meningkatnya kemampuan Tiongkok untuk menerapkan ADIZ di LTS, AS berulang kali mendesak Tiongkok dan juga negara pengklaim lainnya untuk mengentikan proyek reklamasi di LTS. Dalam pandangan AS, tindakan-tindakan Tiongkok dapat meningkatkan resiko konflik di kawasan. Untuk mengamati proyek reklamasi serta memantau aktivitas militer Tiongkok di kawasan sengketa, AS mengirimkan pesawat mata-mata terancanghanya, Poseidon P8-A, yang kemudian dihalau oleh AL Tiongkok. Tindakan tersebut dilakukan AS untuk menunjukkan sikap mereka bahwa wilayah itu merupakan wilayah udara internasional di mana pesawat negara manapun bebas berpatroli. Tindakan ini memicu ketegangan di antara kedua negara. Selain itu, AS juga mendorong negara-negara di kawasan, termasuk negara-negara anggota ASEAN untuk bersikap lebih tegas terhadap tindakan-tindakan Tiongkok.

Melihat perkembangan di LTS, negara-negara di kawasan, bahkan negara pengklaim tampaknya memilih untuk lebih berhati-hati dalam merespon tindakan Tiongkok. Negara-negara ini menginginkan agar negara-negara besar menjaga hubungan baik agar negara-negara yang lebih kecil tidak mengalami kerugian akibat permusuhan di antara mereka. Negara-negara kecil ini menghindari sikap yang secara tegas memihak salah satu kekuatan besar tersebut. Tampaknya, jika AS bersikap terlalu berani menekan Tiongkok justru akan menyebabkan AS kehilangan dukungan dari negara-negara tersebut. Meskipun demikian, dalam pertemuan-pertemuan bilateral antara delegasi Tiongkok dan negara-negara kecil di sekitar kawasan LTS di sela-sela forum, sebagian besar dari mereka tetap menyatakan keprihatinan atas proyek Tiongkok di LTS.

Di lain pihak, Laksamana Sun menyatakan bahwa tindakan Tiongkok tersebut

memiliki legitimasi dan penuh damai, sehingga menolak permintaan AS untuk menghentikan reklamasi. Sun mengklaim, tindakan reklamasi merupakan kebebasan kedaulatan Tiongkok dan bertujuan untuk memenuhi tanggungjawab internasional. Tanggung jawab internasional Tiongkok yang mereka maksud antara lain: dalam upaya pencarian dan penyelamatan maritim, pencegahan bencana, penelitian ilmu pengetahuan, observasi meteorologi, perlindungan lingkungan, keamanan navigasi, produksi perikanan, dan pelayanan. Sun menyangkal bahwa apa yang dilakukan Tiongkok merupakan ancaman terhadap kebebasan navigasi, namun juga menegaskan bahwa militer Tiongkok akan mempertahankan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya.

Tindakan AS mengirimkan pesawat pengintai ke wilayah yang diklaim Tiongkok yang kemudian dihalau oleh AL Tiongkok merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketegangan semacam ini baru untuk pertama kalinya terjadi, di mana AS berhadapan langsung dengan Tiongkok. Kondisi semacam ini sangat membahayakan stabilitas kawasan. Pendekatan militer tampaknya bukan cara yang tepat untuk mendesak Tiongkok menahan diri. Apa yang dilakukan AS dapat saja justru memicu Tiongkok untuk memberlakukan ADIZ di LTS, dan akhirnya meningkatkan potensi konflik.

Penutup

Tiongkok dapat saja dan telah memiliki kemampuan untuk memberlakukan ADIZ di LTS. Sekalipun Tiongkok telah menyatakan tidak akan memberlakukannya dalam waktu dekat, Tiongkok juga telah memberi peringatan bahwa jika keamanan maritim dan udaranya terancam maka mereka dapat menggunakan pulau-pulau buaatannya sebagai zona pertahanan. Tindakan AS mengirimkan pesawat mata-mata ke wilayah sengketa telah memberikan sinyal bahwa pendekatan militer untuk menekan Tiongkok sangat beresiko meningkatkan potensi konflik, yang juga kemudian telah memaksa negara-negara kecil di kawasan untuk bersikap lebih hati-hati dalam merespon tindakan-tindakan Tiongkok.

Indonesia memang bukan bagian dari negara yang bersengketa tetapi instabilitas di kawasan LTS bagaimana pun akan

berdampak langsung terhadap kepentingan Indonesia di berbagai bidang. Dengan kondisi di atas, tampaknya DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan suatu pendekatan alternatif non-militer yang dapat ditawarkan kepada kawasan, yang mampu mengingatkan negara-negara yang bersengketa mengenai besarnya kerugian yang dapat mereka alami dari setiap tindakan provokatif mereka.

Referensi

- Bonnie Glaser, "China's Missed Opportunity at the Shangri-La Dialogue", <http://amti.csis.org/chinas-missed-opportunity-at-the-shangri-la-dialogue/>; diakses tanggal 4 Juni 2015.
- Feng Zhang, "Should Beijing Establish an Air Defense Identification Zone Over the South China Sea?", <http://foreignpolicy.com/2015/06/04/should-beijing-establish-an-air-defense-identification-zone-over-the-south-china-sea/>; diakses tanggal 4 Juni 2015.
- "Nice Words from China and U.S. Fail to Dim South China Sea Tension", <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-31/careful-words-at-defense-forum-belie-south-china-sea-clash-risks>; diakses tanggal 4 Juni 2015.
- Prashanth Parameswaran, "How Close is China to Another South China Sea Airstrip?", <http://thediplomat.com/2015/01/how-close-is-china-to-another-south-china-sea-airstrip/>; diakses tanggal 4 Juni 2015.
- Richard Javad Heydarian, "Showdown at Shangri-La: Confronting China's Maritime Ambitions", <http://amti.csis.org/showdown-at-shangri-la-confronting-chinas-maritime-ambitions/>; diakses tanggal 4 Juni 2015.
- "South China Sea ADIZ depends on security threats: admiral", http://english.chinamil.com.cn/news-channels/china-military-news/2015-06/01/content_6516593.htm; diakses tanggal 4 Juni 2015.
- Zachary Keck, "PLA Officer: China Must Establish South China Sea ADIZ", <http://thediplomat.com/2014/02/pla-officer-china-must-establish-south-china-sea-adiz/>; diakses tanggal 4 Juni 2015.